

DIROSAT

Journal of Education, Social Sciences & Humanities

Vol. 1, No. 4, 2023 ISSN : 2985-5497

<https://dirosat.com>

Research Article

Integrasi Pengetahuan Berlalu Lintas Dalam Proses Pembelajaran PPKN Di SMK Negeri 7 Bone

Ariska¹, Mustari², Najamuddin³

1. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, aulariska12@gmail.com
2. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, mustari6508@unm.ac.id
3. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, najamuddin@unm.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 21, 2023

Revised : August 08, 2023

Accepted : September 10, 2023

Available online : October 14, 2023

How to Cite: Ariska, Mustari, & Najamuddin. (2023). Integration of Traffic Knowledge in the PPKN Learning Process at SMK 7 Bone. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 1(4), 130–141. <https://doi.org/10.58355/dirosat.vii4.52>

Integration of Traffic Knowledge in the PPKN Learning Process at SMK 7 Bone

Abstract. The aim of this research is to find out about (i) The integration of traffic knowledge in the PPKn learning process at SMK Negeri 7 Bone, (ii) The level of compliance with traffic laws for students at SMK Negeri 7 Bone, (iii) The strategies implemented by the school and the police in integrating traffic knowledge for students. This type of research is mixed methods, namely a type of research that combines qualitative and quantitative research using percentage analysis. The results of the research show that, (i) Integration of traffic knowledge in the PPKn learning process at SMK Negeri 7 Bone is found in several basic competencies in classes XI and ii) The level of traffic knowledge for students is still relatively low, this can be seen from the traffic education knowledge indicator (iii) The strategy

that the school has implemented in integrating traffic knowledge through several activity and outreach programs delivered directly by the Principal and the police.

Keywords: Integration, traffic knowledge, PPKn

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang (i) Integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bone, (ii) Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas bagi peserta didik di SMK Negeri 7 Bone, (iii) Strategi yang dilakukan sekolah dan kepolisian dalam mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas bagi peserta didik. Jenis penelitian ini adalah mixed methods, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif yang menggunakan analisis persentase. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, (i) Integrasi Pengetahuan Berlalu lintas dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bone terdapat dalam beberapa kompetensi dasar pada kelas XI dan XII dengan materi pokok yakni sistem hukum dan peradilan di Indonesia dan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia (ii) Tingkat Pengetahuan berlalu lintas bagi peserta didik tergolong masih kurang hal ini dapat dilihat dari indikator pengetahuan pendidikan berlalu lintas (iii) Strategi yang telah dilakukan sekolah dalam mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas melalui beberapa program kegiatan dan sosialisasi yang disampaikan langsung oleh Kepsek dan pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan peserta didik dapat menjadikan pengetahuan berlalu lintas sebagai pengetahuan dan pemahaman akan kemanfaatan dalam berlalu lintas jalan demi ketertiban maupun kenyamanan dan keselamatan itu sendiri.

Kata Kunci: Integrasi, Pengetahuan berlalu lintas, PPKn

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangunan bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang sangat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental, pikir, kepribadian manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.

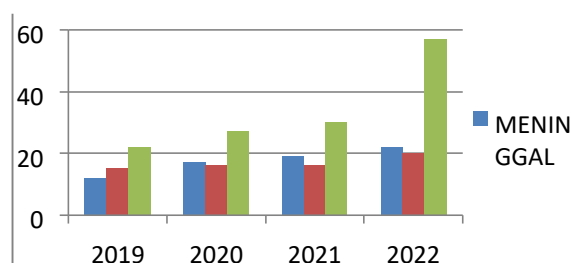
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Selanjutnya pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan perubahan kurikulum pada tahun 2013 maka istilah PKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam

memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan terkait dengan beberapa permasalahan antara lain kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas masih kurang. Hal ini terlihat dari makin tingginya pelanggaran lalu lintas, yang berdasar pada data kepolisian makin tahun jumlahnya meningkat.

Peningkatan jumlah kendaraan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan para pengendara, di Kabupaten Bone menunjukkan beberapa ruas jalan di perkotaan padat dilalui pengguna jalan bila para pengendara kurang mematuhi peraturan yang berlaku tentu hal ini dapat memicu ketertertiban berlalu lintas akan terganggu termasuk mengakibatkan kemacetan. Terdapat pula fenomena tingkat kecelakaan mengalami peningkatan yang signifikan, dari data Kepolisian Kabupaten Bone empat tahun terakhir.

Gambar 1. keadaan Pengguna Lalu lintas Jalan Kab. Bone



Sumber (Dokumentasi, Satlantas Polres Bone, Tahun 2022).

Pada saat ini keadaan lalu lintas jalan raya di kota-kota besar khususnya di Kabupaten Bone terlihat semakin padat. Hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan dan pengendara khususnya pelajar semakin meningkat. Terdapatnya beberapa korban usia dini dalam kasus kecelakaan lalu lintas jalan merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan dan perlu sebuah upaya sejak awal agar meminimalisir berbagai permasalahan lalu lintas sejak dini bagi pengguna pemula agar menjadi regenerasi yang baik dikemudian hari.

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas sudah lama diterapkan pada dunia pendidikan khususnya di SMK Negeri 7 Bone, namun pelaksanaannya belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh : (1) Kemampuan guru belum menerapkan integrasi berlalu lintas dalam proses pembelajaran (2) Tidak jelasnya materi guru PKN dapat mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas (3) RPP guru tidak jelasnya rancangannya dalam menerapkan integrasi berlalu lintas.

Pihak Polres satlantas bersama Dinas pendidikan kabupaten bone telah melakukan MOU untuk melaksanakan program sosialisasi pembinaan pendidikan berlalu lintas kesekolah-sekolah sebagai upaya untuk melindungi pelajar dari bahaya kecelakaan dan secara tidak langsung memberikan himbauan kepada orang tua agar tidak memberikan anaknya kendaraan sebelum usianya mencukupi Mengingat siswa

merupakan generasi penerus bangsa maka pendidikan tentang taat hukum seperti pengintegrasian materi pendidikan lalu lintas disekolah sangat penting.

Dengan demikian upaya integrasi pengetahuan berlalu lintas disekolah sangat penting terutama dalam hal bagaimana mengintegrasikan pendidikan berlalu lintas di sekolah yang secara khusus bagaimana di mata pelajaran PKN di integrasikan pendidikan berlalu lintas.

Berdasarkan fenomena diatas maka dari itu peneliti tertarik ingin mengetahui hal bagaimana mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas di sekolah yang secara khusus bagaimana di mata pelajaran PKN di integrasikan pengetahuan berlalu lintas di SMK Negeri 7 Bone, maka penulis simpulkan untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang. "Integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam proses pembelajaran PPKN di SMK Negeri 7 Bone"

Adapun tujuan penelitian ini untuk 1) mengetahui integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bone 2) mengetahui tingkat pengetahuan berlalu lintas peserta didik di SMK Negeri 7 Bone 3) mengetahui strategi apa yang dilakukan sekolah dalam mengintegrasikan pengetahuan bagi berlalu lintas peserta didik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Teori kesadaran hukum menjelaskan kesadaran hukum dapat diukur dari 4 indikator yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum Dan teori Kepatuhan hukum merupakan proses psikologis yang dapat ditinjau dari tiga proses dasar yaitu, Compliance, identification dan Internalization.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *mixed methods*, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif yang menggunakan analisis persentase. Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*). Dalam penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dalam menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone tepatnya di SMK Negeri 7 Bone. sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan gambar/foto. Dengan Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan di SMK Negeri 7 Bone, sedangkan Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan yang berlaku ataupun referensi yang berkaitan.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di SMK Negeri 7 Bone terkait pembelajaran melalui mata pelajaran PPKn. selanjutnya wawancara, memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan petugas polisi tentang pendidikan berlalu lintas, angket Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan teknik random sampling. Jadi berdasarkan teknik tersebut maka angket ini diberi kepada 72 peserta didik dan dokumentasi dengan melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil data yang relevan dengan penelitian dan

pengambilan gambar pada saat observasi, wawancara dan aktivitas peserta didik di SMK Negeri 7 Bone. Pengumpulan data diawali dengan menelaah dan mempelajari semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan simpulan. Kemudian pada teknik validasi data atau validasi data menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknis dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pengetahuan Berlalu Lintas Dalam Proses Pembelajaran PPKn Di SMK Negeri 7 Bone

Integrasi pengetahuan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah isi/konten materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dapat diartikan sebagai sebagai penggabungan atau penyatuan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi PPKn melalui telaah kompetensi dasar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru PPKn bersama guru wali kelas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ada isi materi pendidikan Lalu Lintas, hanya di materi tertentu saja yang berhubungan dengan materi pendidikan lalu lintas dalam buku Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Kurikulum 2013 PPKn yaitu : Berdasarkan hasil penelitian Dalam pembelajaran mengenai Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, pendidikan berlalu lintas dapat diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan peradilan terkait dengan lalu lintas. Peserta didik akan mempelajari bagaimana sistem hukum Indonesia beroperasi dalam mengatur lalu lintas dan menegakkan aturan-aturan yang terkait.

Peserta didik diajarkan tentang peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelengkap lainnya. Mereka memahami pentingnya mentaati aturan lalu lintas sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial. Selain itu, peserta didik juga mempelajari hukuman dan sanksi yang dapat diterima jika melanggar aturan lalu lintas, termasuk denda, tilang, atau tindakan hukum lainnya. Dalam konteks Sistem Hukum dan Peradilan, pendidikan berlalu lintas juga membahas peran dan tugas aparat penegak hukum dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Peserta didik memahami bagaimana polisi lalu lintas, petugas patroli jalan, atau aparat penegak hukum lainnya bertugas untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Mereka juga memahami peran sistem peradilan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk proses pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, pengambilan bukti, dan peran saksi dalam persidangan.

Selain itu, peserta didik juga belajar tentang upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam konteks lalu lintas. Mereka mempelajari hak-hak dan kewajiban pengendara serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Peserta didik juga dapat memahami pentingnya asuransi lalu lintas dan peran lembaga hukum terkait dalam menangani klaim asuransi terkait lalu lintas.

Melalui integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam proses pembelajaran pada materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang aspek hukum dan peradilan yang terkait dengan lalu lintas. Mereka juga akan memahami peran penting sistem hukum dan peradilan dalam menjaga keselamatan, keadilan, dan ketertiban di jalan raya.

Mentaati aturan lalu lintas: Salah satu tugas utama peserta didik adalah mentaati aturan lalu lintas yang berlaku. Mereka harus memahami dan mematuhi semua peraturan dan tandatanda lalu lintas yang ditetapkan, seperti batas kecepatan, rambu-rambu, dan lampu lalu lintas. Dengan melaksanakan tugas ini, peserta didik berkontribusi dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

Memiliki kesadaran hukum berlalu lintas: Peserta didik diharapkan memiliki kesadaran hukum yang baik terkait dengan lalu lintas. Mereka harus memahami bahwa melanggar aturan lalu lintas dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk denda, tilang, atau sanksi lainnya. Dengan memiliki kesadaran hukum yang baik, peserta didik dapat menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab dan meminimalisir pelanggaran. Kemudian materi pelajaran Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Dalam materi Perlindungan dan Penegakan Hukum, integrasi pendidikan berlalu lintas dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang aspek hukum yang terkait dengan lalu lintas dan pentingnya penegakan aturan untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Berikut adalah narasi tentang integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam mata pelajaran Perlindungan dan Penegakan Hukum yaitu, Dalam mata pelajaran Perlindungan dan Penegakan Hukum, pendidikan berlalu lintas dapat diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dalam konteks lalu lintas. Peserta didik diajarkan tentang peraturan lalu lintas, tanggung jawab hukum pengendara, dan peran penegakan hukum dalam menjaga keselamatan di jalan.

Peserta didik mempelajari aturan lalu lintas yang berlaku dan konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan tersebut. Mereka belajar tentang hukuman dan sanksi yang dapat diterima jika melanggar aturan, seperti denda, tilang, penalti, atau tindakan hukum lainnya. Pemahaman ini memberikan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya mentaati aturan lalu lintas dan mematuhi hukum sebagai bentuk ketaatan sosial.

Dalam konteks Perlindungan dan Penegakan Hukum, pendidikan berlalu lintas juga membahas peran dan tugas penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Peserta didik mempelajari peran polisi lalu lintas, petugas patroli jalan, atau aparat penegak hukum lainnya yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Mereka juga memahami bagaimana penegakan hukum dapat mencegah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses pembelajaran saat menjelaskan situasi yang berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum lalu lintas kepada peserta didik, Berikut adalah beberapa contoh situasi yang di jelaskan :
1) Kecelakaan lalu lintas: guru menjelaskan situasi kecelakaan lalu lintas dan bagaimana hakikat perlindungan dan penegakan hukum berlalu lintas terkait. Contohnya, guru menggambarkan skenario di mana dua kendaraan bertabrakan dan

menyebabkan cedera pada pengemudi dan penumpang. guru menjelaskan bahwa sistem peradilan akan berperan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan memastikan bahwa hak korban dilindungi. 2) Pelanggaran aturan lalu lintas: guru membahas situasi di mana seseorang melanggar aturan lalu lintas, misalnya melanggar batas kecepatan atau melanggar isyarat lampu lalu lintas. Di jelaskan juga bahwa pelanggaran semacam itu dapat berdampak negatif dan dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau hukuman tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku. 3) Patroli lalu lintas: guru menjelaskan pentingnya patroli lalu lintas yang dilakukan oleh petugas penegak hukum. menceritakan tentang bagaimana petugas polisi lalu lintas melakukan patroli di jalan raya untuk memantau pelanggaran dan memberikan peringatan atau sanksi sesuai dengan hukum. bahwa tujuan dari patroli lalu lintas adalah untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. 4) Perlindungan hak korban kecelakaan: guru memberikan contoh situasi di mana seorang korban kecelakaan mengalami cedera atau kerugian. Jelaskan bahwa hak korban termasuk hak atas perawatan medis yang adekuat, hak mendapatkan kompensasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses peradilan jika ada tindakan kelalaian atau pelanggaran hukum yang terjadi. 5) Kesadaran hukum dan pendidikan berlalu lintas: guru membahas pentingnya kesadaran hukum dan pendidikan berlalu lintas dalam mencegah pelanggaran dan kecelakaan. Beri contoh tentang kampanye keselamatan di jalan raya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas, keselamatan, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Jelaskan bahwa pendidikan berlalu lintas dapat membantu masyarakat memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum lalu lintas.

Tingkat Pengetahuan Pendidikan Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik di SMK Negeri 7 Bone

Pengetahuan berlalu lintas peserta didik penting untuk diingat bahwa tingkat pengetahuan berlalu lintas peserta didik biasanya tergantung pada pendidikan dan pelatihan yang mereka terima. Sekolah memiliki kurikulum yang mencakup pendidikan lalu lintas, yang melibatkan penjelasan mengenai peraturan lalu lintas, tanda-tanda jalan, dan perilaku yang aman di jalan raya. Namun, di beberapa tempat, pendidikan lalu lintas mungkin kurang ditekankan atau bahkan tidak diajarkan secara teratur.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan Tingkat pengetahuan berlalu lintas peserta didik masih tergolong masih kurang, hal ini dapat terlihat dari hasil angket yang telah dianalisis melalui persentase. Indeks yang ditemukan berada di angka 1,94, 2.06 dan 1,91 yang berarti mendekati dari kategori baik yakni kisaran 2,51 - 3,25.

Tingkat pengetahuan yang masih kurang tentang lalu lintas pada peserta didik yang dapat berdampak negatif pada keselamatan mereka ketika mereka berada di jalan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang, sekolah, dan keluarga untuk bekerja sama dalam memberikan pendidikan lalu lintas yang komprehensif kepada peserta didik. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang aturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan mereka saat beraktivitas di jalan raya. ini

merupakan isu yang serius karena berpotensi mengancam keselamatan mereka ketika berada di jalan raya.

Salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu mengenai Kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas di Kota Makassar (Studi Kasus pada Kalangan SMA dan SMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kesadaran berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar tergolong rendah. Ini terlihat dari banyaknya jenis pelanggaran oleh peserta didik (2) faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar adalah karena semata-mata takut akan sanksi. Ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum yaitu Compliance.

Pada penelitian integrasi pengetahuan berlalu lintas Berdasarkan penelitian hasil pengisian angket peserta didik masih kurangnya pengetahuan sehingga berdampak pada kesadaran peserta didik dalam berlalu lintas. salah satu masalah serius, peserta didik tidak biasa dengan istilah lalu lintas jalan, ini karena kurangnya pengetahuan peserta didik tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan lalu lintas jalan. Peserta didik yang tidak biasa terhadap istilah-istilah tersebut dapat menghadapi kesulitan dalam memahami aturan lalu lintas, tanda-tanda jalan, dan interaksi yang aman di jalan raya. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kesadaran akan keselamatan jalan.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), tingkat pengetahuan pendidikan berlalu lintas dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen pembelajaran. Dalam konteks PPKN, pendidikan berlalu lintas dapat membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan, keselamatan, dan tanggung jawab sosial di jalan raya. Berikut adalah narasi tentang tingkat pengetahuan pendidikan berlalu lintas dalam proses pembelajaran PPKN.

Strategi yang Dilakukan Sekolah Dan Kepolisian Dalam Mengintegrasikan Pengetahuan Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik

Sekolah merupakan pihak yang berperan penting dalam mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas pada peserta didik beberapa strategi yang dilakukan dalam mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas adalah sebagai berikut:

a. Program kegiatan Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam strategi pengintegrasian pengetahuan berlalu lintas beberapa program kegiatan yaitu: 1) Integrasi pengetahuan berlalu lintas pada setiap mata pelajaran khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus terlihat melalui penyusunan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) dan dalam proses pembelajaran. 2) Integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah kembali akan di aktifkan. Dengan dilakukannya Aktivasi kembali kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah sebagai bagian dari integrasi pendidikan berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah merupakan langkah yang baik. Kegiatan ekstrakurikuler PKS dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami

pentingnya keselamatan dan aturan lalu lintas. 3) Kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain: Berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain, terutama mata pelajaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan berlalu lintas, seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, atau Bahasa Indonesia. Diskusikan cara-cara untuk mengintegrasikan konsep berlalu lintas dalam pembelajaran mereka juga. Misalnya, mengeksplorasi data statistik kecelakaan lalu lintas dalam pelajaran Matematika atau menulis laporan penelitian tentang perkembangan teknologi di industri otomotif dalam pelajaran IPA. 4) Bekerja sama dengan keluarga siswa melalui penerapan budaya tertib lalu lintas. Kehadiran keluarga menjadi penentu atau aktor terpenting dalam pembudayaan etika berlalu lintas. Keluarga sangat berperan dalam membentuk kedisiplinan dan kebiasaan budaya tertib berlalu lintas. Namun demikian, keluarga juga sebaliknya bisa menjadi peran penting yang mendukung pelanggaran tertib berlalu lintas ketika membiarkan anak-anak atau anggota keluarganya yang belum memiliki surat ijin mengemudi diperbolehkan membawa sepeda motor ke sekolah. Tentunya pembiasaan ini bertentangan dengan pembudayaan etika berlalu lintas yang telah ditempuh oleh pemerintah dan sekolah. Selain keluarga, masyarakat juga sangat berperan dalam memonitor dan mengevaluasi penerapan kurikulum pendidikan etika berlalu lintas yang telah diintegrasikan melalui pembelajaran di sekolah dan di rumah.

b. Bermitra dengan petugas polisi

Strategi yang dilakukan dalam mengintegrasikan pendidikan berlalu lintas, adalah sebagai berikut : 1) Sosialisasi berlalu lintas jalan. Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara terhadap kepolisian, bahwa dalam meningkatkan pendidikan berlalu lintas peserta didik perlunya pengintegrasian pendidikan berlalu lintas melalui modul pengintegrasian pendidikan lalu lintas. Kegiatan sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan aturan berlalu lintas serta menumbuhkan kesadaran pengguna jalan agar dapat tertib dan mematuhi aturan demi ketertiban dan keselamatan berkendara serta disampaikan tentang edukasi bagi peserta didik. Sosialisasi ini diharapkan dapat merata bagi pengendara, terutama bagi kalangan pelajar dan Mahasiswa agar dapat tersentuh sosialisasi berupa kegiatan kunjungan atau dalam bentuk seminar akan pentingnya pendidikan berlalu lintas yang dilaksanakan kepolisian. Secara umum sosialisasi dapat pula di laksanakan melalui media-media baik tentang petunjuk maupun peringatan pentingnya kepatuhan hukum berlalu lintas jalandengan memasang sejumlah baliho, stiker dan sejenisnya beserta dapat pula di publikasikan melalui radio-radio setempat beserta TV lokal.

2. Penertiban berlalu lintas jalan. Penertiban berlalu lintas jalan sebagaimana hasil wawancara terhadap kepolisian merupakan upaya Preventif yang dilakukan berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan terlebih untuk menghindari terjadinya dampak dari pelanggaran itu sendiri. Penertiban ini perlu ditingkatkan khususnya secara merata di setiap pos kepolisian pada lampu lalu lintas, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan edukasi dan tertibnya berlalu lintas. Patroli berjalan juga merupakan upaya penertiban yang dilaksanakan kepolisian yang efektif dalam menertibkan pengendara yang masih saja tidak memperhatikan kelengkapan dalam berkendara begitupun kelengkapan

kendaraannya yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan serta bagi pelanggar lalu lintas yang masih saja berusaha menghindari petugas dapat di amankan melalui patroli berjalan.

Pemerintah Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Lalu Lintas Kab. Bone yang telah melakukan MOU telah melaksanakan sejumlah kegiatan di beberapa sekolah yaitu: a) Sosialisasi tertib lalu lintas dan safety riding pada beberapa sekolah menengah atas di Kab. Bone secara rutin, Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas dan safety riding dilaksanakan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan secara bergiliran di Kab. Bone Peserta kegiatan sosialisasi adalah para siswa sekolah yang dituju. b) Pembina upacara dan sosialisasi etika berlalu lintas, Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran di SMA/SMK di Kab. Bone. Dengan menjadi Pembina upacara bendera hari senin, pihak kepolisian dapat melakukan sosialisasi etika berlalu lintas kepada seluruh guru dan siswa c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah d) Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan berlalu lintas kepada Guru mata pelajaran PPKN di Kab. Bone e) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan

SIMPULAN

Integrasi pengetahuan berlalu lintas dalam proses pembelajaran PPKn Bone terdapat dalam beberapa kompetensi dasar pada kelas XI dan XII dengan materi pokok yakni sistem hukum dan peradilan di Indonesia dan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi Integrasi pendidikan berlalu lintas dalam proses pembelajaran pada materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia dalam pengetahuan berlalu lintas juga membahas peran dan tugas aparat penegak hukum dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Peserta didik memahami bagaimana polisi lalu lintas, petugas patroli jalan, atau aparat penegak hukum lainnya bertugas untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Mereka juga memahami peran sistem peradilan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk proses pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, pengambilan bukti, dan peran saksi dalam persidangan. Dalam mata pelajaran Perlindungan dan Penegakan Hukum, pendidikan berlalu lintas dapat diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dalam konteks lalu lintas. Peserta didik diajarkan tentang peraturan lalu lintas, tanggung jawab hukum pengendara, dan peran penegakan hukum dalam menjaga keselamatan di jalan. Sedangkan Tingkat Pengetahuan berlalu lintas bagi peserta didik tergolong masih kurang hal ini dapat dilihat dari indikator pengetahuan pendidikan berlalu lintas dan Strategi yang telah dilakukan sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan berlalu lintas melalui beberapa program kegiatan dan sosialisasi yang disampaikan langsung oleh Kepsek dan pihak kepolisian.

Dari kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu : Pengintegrasian pengetahuan lalu lintas pada mata pelajaran PKN dalam pelaksanaannya di integrasikan secara intensif. Kurangnya tingkat pengetahuan berlalu lintas peserta didik di SMK Negeri 7 Bone, maka diharapkan bagi peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pengintegrasian pengetahuan berlalu lintas. Diharapkan bagi sekolah agar aktif dalam

mengintegrasikan pengetahuan berlalu lintas pada peserta didik dengan mengintensifkan kegiatan dalam proses pembelajaran bagi pihak kepolisian serta lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi demi terwujudnya ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco A dkk, 2016. *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2 Thn.
- Agung Dwi, Arifin Samsul, 2016. *Pengaruh Usia, Pendidikan Dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Jepara*. The 3rd University Research Colloquium
- Madiong Baso, 2019. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. CV Sah Media Makassar. 292 Halaman.
- Fatur, Husen. 2020. *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Universitas Muslim Indonesia. Journal of Criminal Law. Vol.2 No. 12.
- Hasibuan, Pranata Jimmy, Dkk. 2014. *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 3 Cirebon*. Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Unnes Civic Education Journal 3 (2).
- Hikmah, Pitoewas Berchah, Dkk. 2015 . *Pengaruh Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran Pkn Terhadap Perilaku*. Jurnal media netiti.
- Kusuma Ine, 2019. *Integrasi Pendidikan Lalu Lintas Di Sekolah*, Jurnal Tunjuk Ajar, Volume 2, Nomor 1.
- Kristiono Natal, 2018. *Integrasi Pendidikan Safety Riding Dalam Mata Pelajaran Ppkn Sebagai Upaya Pendidikan Sadar Lalu Lintas (Studi Kasus Smk Pgri 1 Taman Pemalang*. Harmony : Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn Vol.3 No.1.
- Mariani. 2019. *Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas*. Tesis. Program Pascasarjana UNM. Phinisi Intergration Review. Vol. 2 No. 2.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- PP Nomor 30 Tahun 2021. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Rahayu Sugi, 2018. *Collaborative Governance dalam Pembudayaan Etika Berlalu-Lintas Pelajar SMA di Kota Yogyakarta*. Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.
- Rosana Ellya, 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. UIN (Universitas Islam Negeri) Raden. Jurnal TAPIs. Vol.10 No.1
- Santi, 2016. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E Makassar*. Tomalebbi. Jurnal. Vol 3 No. 3
- Sugiarto, U. S. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tabrani Rasyid, 2015. *Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Jalan Di Kabupaten Bone*. Tesis. Tidak diterbitkan. Makassar. Program Pascasarjana UNM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

- Winarsih Murni 2017. *Pendidikan Integrasi Dan Pendidikan Inklusi*. Universitas Negeri Jakarta, Hikmah, Vol. XIII, No. 2.
- Winarni Sri, 2013. *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan*. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. III, No. 1.
- Yunisca Nurmalisa, Rohman, Dkk. 2020. *Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Civic Conscience*. Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Volume 07, Nomor 01.